

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak ada satupun negara diproklamasikan tanpa cita-cita abadi luhur, karena disetiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan (Yustika, 2003). Begitupun Indonesia, didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi dan menjadi pusat perhatian bagi setiap negara manapun salah satunya adalah Indonesia. Menurut Todaro dan Smith (2011) pembangunan diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak *output* yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan suatu negara. Dalam jangka panjang, pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

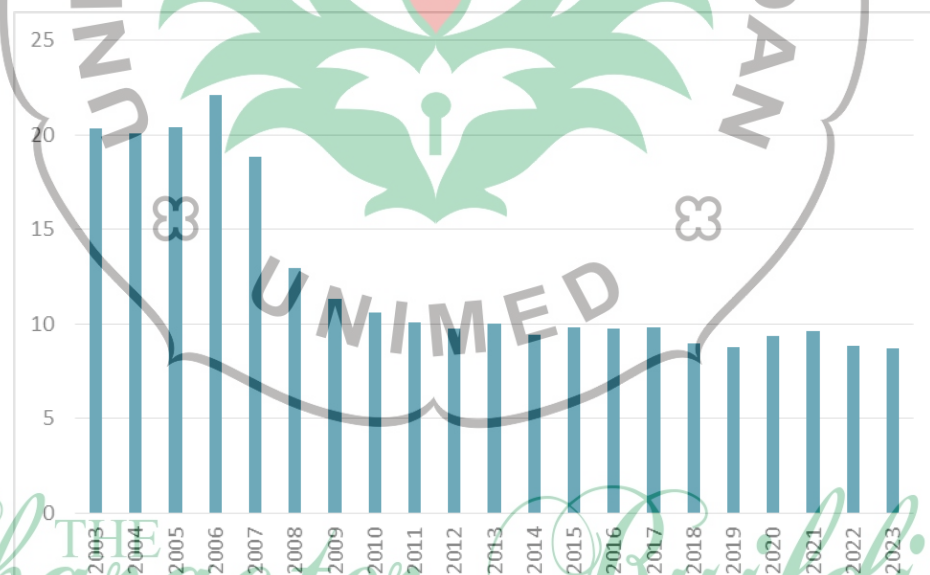
Kemiskinan telah menjadi perbincangan dan kajian yang menarik bagi banyak kalangan, mulai dari masyarakat awam, birokrat, politikus, pemimpin agama, hingga akademisi (Maipita, 2014). Kemiskinan ialah suatu kondisi yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai negara khususnya di negara berkembang. Bangsa Indonesia selaku negara berkembang perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Menurut Indra Maipita (2014) kemiskinan adalah sebuah

fenomena, suatu kenyataan yang belum dan tidak akan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan dan perbedaan sumber daya.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi sarang kemiskinan. Kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Predikat negara miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal begitu melimpah. Sehingga menjadikan kemiskinan sebagai musuh utama bagi negara ini yang sedang membangun untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Dimana berbagai wilayah berada dalam lingkaran kemiskinan seperti sangat susah untuk melepaskan atau keluar dari zona tersebut.

Provinsi di Indonesia yang masih mengalami masalah kemiskinan salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Biro perekonomian setda Provinsi Sumatera Utara (2022) menjelaskan pada tahun 2022 Sumatera Utara menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 8,15% pada September 2022. Kemiskinan ini terjadi akibat masih tingginya tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang timbul akibat rendahnya kualitas hidup manusia yang di gambarkan oleh rendahnya pendapatan serta aset untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, minuman, tempat tinggal. Khususnya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang sama halnya seperti Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang masih mengalami masalah kemiskinan.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang ibukotanya adalah Doloksanggul. Kabupaten Humbang Hasundutan juga masih menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang utama akan tetapi belum mempunyai strategi yang kuat untuk menanganinya. Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda-beda berdasarkan dari kondisi demografis hingga kebijakan daerahnya termasuk di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berikut grafik tingkat kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber : BPS Humbang Hasundutan

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2003-2022

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan berfluktuasi dengan trend menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 22.14% yang timbul akibat naiknya harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian turun ditahun tahun berikutnya. Selanjutnya

dalam kurun waktu terakhir pada tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan meningkat sebesar 9.36% - 9.65% jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya 8.75%. Peningkatan kemiskinan di tahun 2020-2021 terjadi akibat penyebaran virus Covid 19 telah menurunkan berbagai kegiatan ekonomi, menurunnya aktivitas ekonomi karena pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina wilayah di sejumlah negara. Tidak terelakkan pula penyebaran Covid-19 di Indonesia secara masif telah memukul kinerja perekonomian domestik. Efek pelemahan kinerja perekonomian domestik tersebut meluas pada kehidupan pencaharian masyarakat yang meningkatkan potensi kehilangan lapangan pekerjaan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah tidak hanya mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, namun diikuti meningkatnya angka kemiskinan secara masif sebagai akibat menurunnya pendapatan masyarakat dan pelemahan daya beli. Kemudian di tahun 2022-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan menurun menjadi 8.86%- 8.69 seiring membaiknya perekonomian khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.

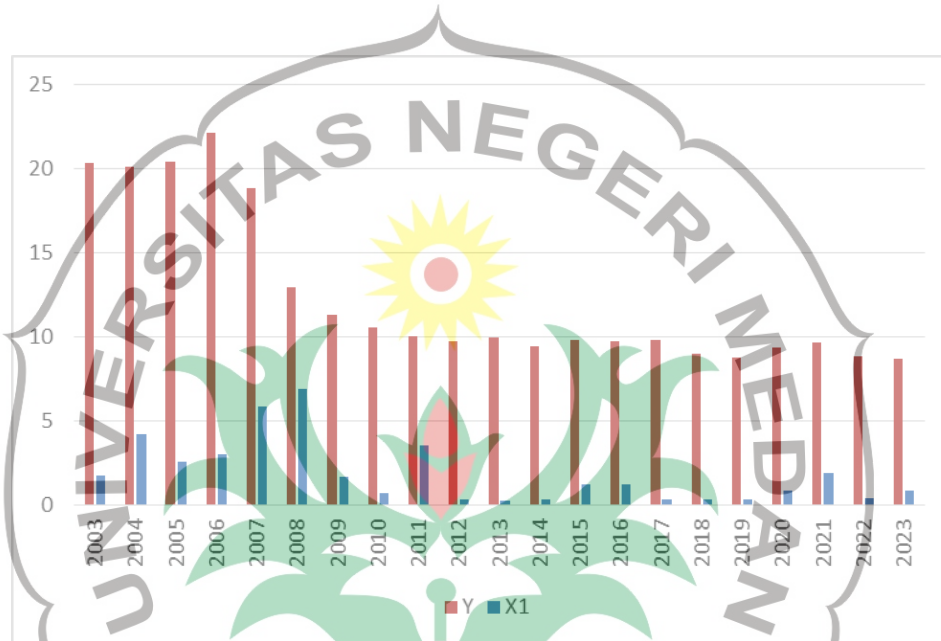
Elfindri, *et.al* (2019) penyebab kemiskinan sangat beragam, di mana faktor-faktor utama yang menjelaskannya yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia, kekurangan modal kerja, tekanan demografis, terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran, pendidikan yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang rendah. Teori ini juga sejalan dengan penelitian Ridho, Herniwati dan Nenik dengan hasil temuan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah demikian juga dengan penelitian oleh Hannisa

dkk, dengan hasil temuan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Sumatera Utara serta penelitian yang dilakukan oleh Reki, Yulmardi dan Adi dengan hasil temuan bahwa pertumbuhan ekonomi secara individual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di setiap negara maupun daerah yaitu tingkat pengangguran terbuka. Menurut Sukirno (2006) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Irawan & Suparmoko (2002) pengangguran merupakan individu yang berada pada umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku. Munculnya pengangguran karena kenaikan kualitas penduduk usia kerja tidak diiringi dengan lapangan kerja sehingga banyak penduduk usia kerja yang menganggur. Pada masa sekarang ini beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara terutama Kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak terdapat masalah ketenagakerjaan.

Arsyad (2010) berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara tingginya tingkat pengangguran dengan kemiskinan artinya, jika angka pengangguran terjadi peningkatan maka kemiskinan akan meningkat. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya mengakibatkan masalah di bidang perekonomian, namun juga menimbulkan masalah diberbagai aspek sosial lainnya seperti masalah kemiskinan.

Berikut gambar grafik tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



Sumber : BPS Humbang Hasundutan

Gambar 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2003-2023

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2003-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan sebesar 4.21%, selanjutnya pada tahun 2005 mengalami penurunan dan naik kembali mulai tahun 2006-2008. Naiknya kembali tingkat pengangguran pada tahun 2006-2008 diakibatkan oleh minimnya kesempatan kerja. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan kerja yang ditawarkan dan kriteria rekrutmen yang tinggi untuk peluang kerja yang ada, dimana perusahaan kebanyakan menawarkan lapangan kerja yang harus di isi oleh minimal pendidikan diploma ataupun sarjana. Pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami kenaikan disebabkan oleh dampak covid-19 yang berakibat

secara keseluruhan di semua bidang kehidupan masyarakat, seperti sempitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengakibatkan pendapatan penduduk menurun. Hal ini juga berimbas pada tingkat kemiskinan yang semakin naik.

Sesuai teori Arsyad (2010) bahwa terdapat hubungan positif antara tingginya tingkat pengangguran dengan kemiskinan. Akan tetapi dapat dilihat pada grafik data tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat kesenjangan data dengan teori. Pada tahun 2004-2005 data menunjukkan adanya hubungan negatif atau berbanding terbalik dengan teori, demikian juga pada tahun 2007-2008 kembali terjadi kesenjangan data. Hal serupa terjadi di tahun 2011 dan disusul pada tahun 2013-2014. Kemudian pada tahun 2015-2016 arah teori dengan data semakin membaik, tetapi di tahun 2017-2018 terjadi kesenjangan data. Seiring berjalannya waktu, tahun 2019-2022 arah data dengan teori semakin baik. Tetapi pada tahun 2023 kembali terjadi kesenjangan data.

Teori tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Bambang Budhijana dengan hasil temuan bahwa pengangguran terbukti berpengaruh positif dan nyata atau signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, demikian juga dengan penelitian oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priani, dengan hasil temuan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Razzaq Andretama dengan hasil temuan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah demikian juga penelitian yang dilakukan

oleh Reki, Yulmardi dan Adi bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

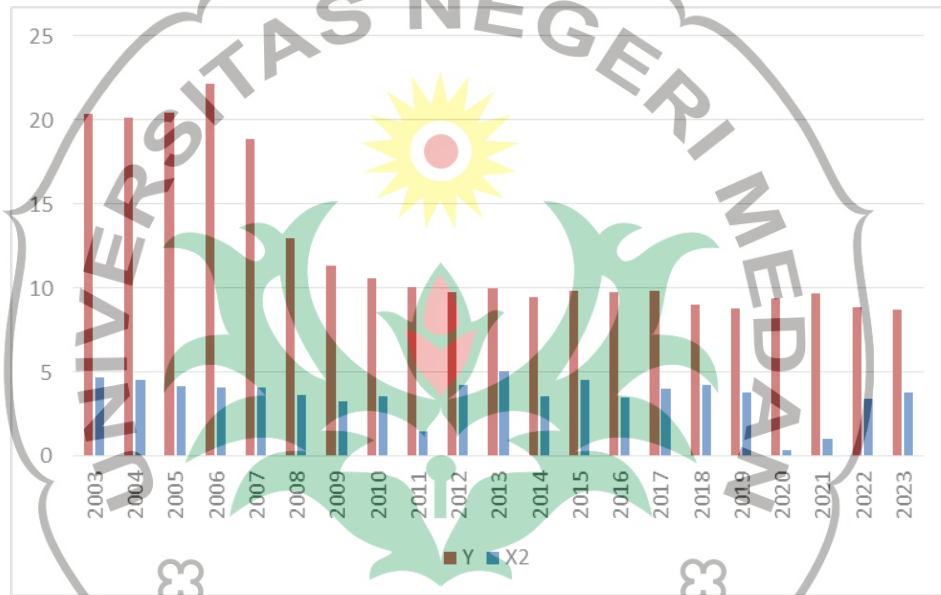
Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dihitung menggunakan pendapatan nasional (Sukirno, 2011). Tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dapat dihitung dari data pendapatan nasional riil yang tersedia. Nainggolan dkk (2005) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita yang memperhatikan dua hal, yaitu output total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Mankiw (2006) menjelaskan perlunya peduli dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu karena negara dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dapat menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik, menyediakan sistem pendidikan

yang lebih baik dan dapat mengukur kemampuan negara untuk mendapatkan hal-hal yang menyusun sebuah hidup yang berarti.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam satu periode tertentu yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Adapun data PDRB yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu PDRB pada sektor pertanian, yang dimana sektor ini merupakan penyumbang pertumbuhan tertinggi di lokasi penelitian. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu negara/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tambunan (2015) menjelaskan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan adalah negatif, yang mana apabila terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Berikut gambar grafik produk domestik regional bruto di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



Sumber : BPS Humbang Hasundutan

Gambar 1.3 Persentase PDRB di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2003-2023

Pada grafik diatas terlihat bahwa rata-rata PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perubahan naik turun disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2003 yaitu sebesar 4.7% kemudian ditahun 2004-2009 terjadi penurunan dan seiring berjalannya waktu ditahun 2010-2023 kembali naik turun disetiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2003-2023 mengalami fluktuasi naik turun, namun peningkatan PDRB ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketimpangan ini dapat dilihat dari kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan daerah lainnya.

Sesuai teori Tambunan (2015) yang menjelaskan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan adalah negatif. Akan tetapi dapat dilihat pada grafik data Produk Domestik Regional Bruto dengan kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat kesenjangan data dengan teori. Pada tahun 2004 data menunjukkan adanya hubungan positif atau berbanding terbalik dengan teori, demikian juga pada tahun 2007-2009 kembali terjadi kesenjangan data. Hal serupa terjadi di tahun 2011 dan disusul pada tahun 2013-2017. Kemudian pada tahun 2018 arah teori dengan data semakin membaik, tetapi di tahun 2019 terjadi kesenjangan data. Seiring berjalannya waktu, tahun 2020 dan 2022 arah data dengan teori semakin baik. Tetapi pada tahun 2023 kembali terjadi kesenjangan data.

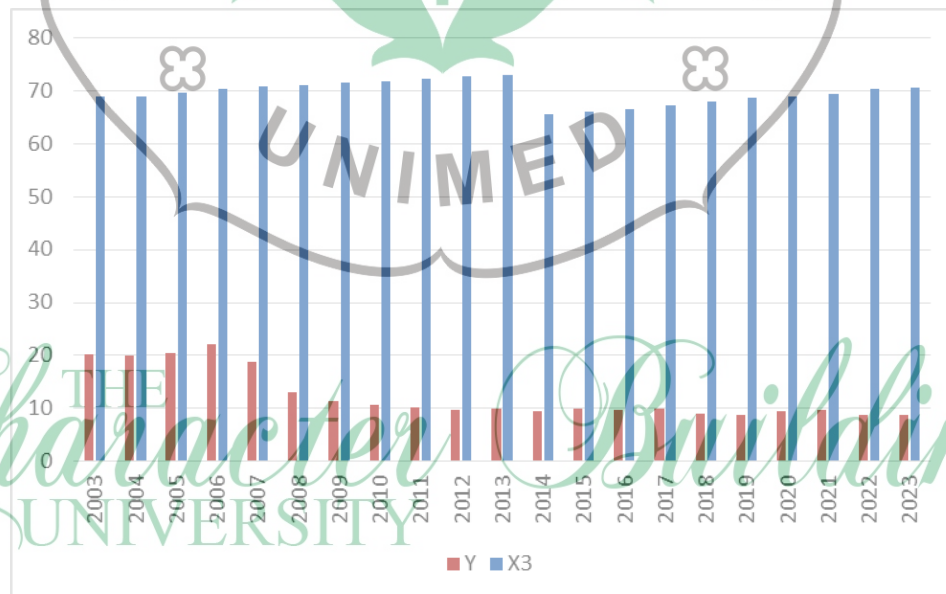
Hal itu juga sejalan dengan hasil penelitian Putri Indah, Sri dan Kiky Asmara dengan hasil temuan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Reni Ria Armayani dkk dengan hasil temuan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Medan. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvira, Josep dan Hanly dengan hasil temuan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Dio, Daisy dan Hanly dengan hasil temuan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud serta penelitian yang dilakukan Abdul Rahman dan Abdurrozzaq Hasibuan dengan hasil temuan bahwa Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini juga tidak hanya melihat pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan, namun juga melihat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung rendahnya tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan memperlihatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang yang semakin baik.

Mardhiyah (2023) menyatakan indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, baik dari segi akibatnya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) ataupun dari segi non fisik (intelektualitas). Pembangunan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia terlihat dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan dalam kondisi non fisik tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang tinggi seharusnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan kata lain jika tingkat IPM tinggi, pastinya tingkat kemiskinan juga rendah.

Arsyad (2010) menyatakan, salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun yang berarti IPM berhubungan negatif dengan kemiskinan. Menurut Sukmaraga (2011) IPM memiliki dampak pada kemiskinan. Jika suatu daerah memiliki nilai IPM yang tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya jumlah penduduk miskin akan berkurang. Berikut grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada gambar 1.4



Sumber : BPS Humbang Hasundutan

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2003-2023

Berdasarkan gambar 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan berfluktuasi baik dengan mengalami

peningkatan mulai tahun 2003-2013 di setiap tahunnya. Kemudian di tahun 2014 IPM mengalami penurunan drastis sebesar 65.59%. Selanjutnya ditahun 2015-2022 IPM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebab terjadinya penurunan IPM secara drastis pada tahun 2014 akibat masih banyaknya orang yang wajib belajar akan tetapi tidak bersekolah. Kemudian mulai tahun 2015-2023 IPM mulai meningkat secara perlahan akibat dari dorongan bantuan sosial yang diberikan pemerintah setiap bulannya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Arsyad (2010) IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun yang berarti IPM berhubungan negatif dengan kemiskinan. Tetapi hal itu kurang sesuai dengan data IPM dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimana data cenderung memiliki hubungan positif. Dapat dilihat pada tahun 2005-2006 data berhubungan positif kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2007-2011 hubungan IPM dengan kemiskinan sesuai teori atau berhubungan negatif. Pada tahun 2012-2015 data justru berbanding terbalik dengan teori dan kembali sesuai di tahun 2016. Demikian juga halnya di tahun 2017, 2020-2021 dan 2023 data berbanding terbalik dengan teori yang dimana berhubungan positif.

Teori ini juga sejalan dengan penelitian R. Bambang Budhijana dengan hasil temuan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Shidiq Ramdan, Mahendra dan Yanti dengan hasil

temuan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priani dengan hasil temuan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan sama halnya dengan penelitian Ema, Wiwin dan Mohammad dengan hasil temuan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang berhubungan dengan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat ditandai dengan kualitas hidup yang tinggi juga hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan kesehatan yang ditandai dengan umur panjang dan tubuh yang sehat. Peningkatan pengetahuan yang ditandai dari tingkat pendidikan dan yang terakhir adalah kehidupan yang layak ditandai dengan peningkatan pendapat yang akhirnya penduduk tersebut dinyatakan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang dengan berbagai permasalahan yang di jelaskan diatas, maka secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Maka dari itu yang menjadi fokus penelitian penulis adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2003-2022.
2. Angka pengangguran yang meningkat tidak hanya mengakibatkan masalah perekonomian tetapi juga menimbulkan masalah di berbagai aspek sosial lainnya, misalnya masalah kemiskinan.
3. PDRB di Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung berfluktuasi.
4. Pada tahun 2020 PDRB di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan yang sangat drastis akibat dari pandemi Covid-19.
5. PDRB dan indeks pembangunan manusia yang rendah mengakibatkan permasalahan ekonomi yang dapat meningkatkan kemiskinan.
6. Trend data tingkat pengangguran terbuka, PDRB dan indeks pembangunan manusia menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori terhadap tingkat kemiskinan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di paparkan sebelumnya, mengingat keterbatasan data, waktu, ilmu serta keterbatasan lainnya maka peneliti membatasi penelitian ini dengan:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2022.
2. Variabel independen penelitian ini yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis menuliskan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan?
3. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan?
4. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis sebagai masukan, pegangan, pertimbangan dan evaluasi bagi peningkatan dari pihak-pihak yang terkait:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian serupa lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan.
- b. Bagi Bappedda Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- c. Bagi Universitas Negeri Medan penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Negeri Medan Khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi.

THE Character Building
UNIVERSITY